
**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2007-2019**

Muhammad David Hariyadi*, Khairi Pahlevi

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

*mdavidhariyadi@gmail.com

Abstract

This research is a type of quantitative research that aims to determine the effect of Local Government Revenue and Balancing Fund on Regional Expenditure, and look for which variable is the most dominant. This research uses time series secondary data 2007-2019 from Local Government Finance Office: The Financial Management Section of Each Local Government in Tapin Regency. Data analysis technique in this research uses Multiple Linear Regression Analysis and Hypothesis testing uses coefficient of determination, F-statistic test, and t-statistic test with 5% significance level (0,05).

The results of the tests indicate that the variable of Revenue Sharing Fund is the only independent variable that has a significant effect as well as being the most dominant variable to the Regional Expenditure. While the variable of Local Government Revenue, General Allocation Fund, and Special Allocation Fund have an insignificant effect on Regional Expenditure in Tapin Regency.

Keywords: *Local Expenditure; Local Government Revenue; Balancing Fund; General Allocation Fund; Special Allocation Fund; Revenue Sharing Fund*

Abstrak

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah, serta mencari variabel mana yang paling dominan. Penelitian ini menggunakan data sekunder kurun waktu tahun 2007-2019 yang didapatkan dari instansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda serta uji hipotesis menggunakan uji koefisien determinasi, uji F-statistik, dan uji t-statistik dengan tingkat signifikansi 5% (0,05).

Hasil dari pengujian pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Dana Bagi Hasil satu-satunya variabel bebas yang memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah. Sedangkan variabel bebas yang lain yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Tapin.

Kata Kunci : Belanja Daerah; Pendapatan Asli Daerah; Dana Perimbangan; Dana Alokasi Umum; Dana Alokasi Khusus; Dana Bagi Hasil

PENDAHULUAN

Perwujudan tujuan nasional yang sesuai dengan isi pembukaan UUD 1945, pembangunan nasional sangat penting karena merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara. Negara dapat dikatakan semakin maju dan berkembang jika tingkat pembangunan suatu negara semakin besar, begitu pun juga daerah. Dalam sebuah pemerintahan daerah, pemerintah diberi wewenang untuk mengelola serta memanfaatkan sumber penerimaan daerah sesuai dengan aspirasi-aspirasi daerah tersebut.

Otonomi daerah menekankan perana serta kemampuan pemerintah daerah dalam membangun serta mengelola keuangan daerah agar semakin semakin baik. Pemerintah daerah disarankan harus mengubah alokasi belanja yang biasanya dianggap kurang produktif dengan mengalokasikan dana belanja daerah ke belanja yang tertuju kepada pendanaan dalam pengadaan pelayanan umum kepada masyarakat di sektor-sektor yang ada, dengan demikian maka dibutuhkanlah dana yang lebih besar yang diharapkan dapat memenuhi belanja pemerintah.

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal menyebutkan bahwa Pendapatan Asli daerah, Dana Perimbangan (DAU, DAK, dan DBH), pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah merupakan sumber penerimaan yang digunakan untuk pendanaan pemerintah daerah serta pembiayaan belanja daerah. Dengan demikian peningkatan pendapatan daerah harus berdampak pada perekonomian daerah.

Perkembangan alokasi dana belanja daerah ini ditentukan dengan besaran penerimaan atau pendapatan daerah. Pemerintah daerah diberikan wewenang penuh dalam menggali potensi sumber daya keuangannya sendiri. Melalui hasil pengelolaan sumber daya yang ada, pemerintah daerah dapat meningkatkan penerimaan daerah. Daerah-daerah yang ada di Indonesia cenderung mengalami masalah dalam penerimaan pendapatan asli daerah dimana pendapatan asli daerah belum mampu untuk memenuhi belanja daerahnya yang artinya daerah tersebut belum mampu mendanai belanja sesuai dengan kemampuannya sendiri. Untuk menutupi hal tersebut, pemerintah pusat memberi dana transfer kepada pemerintah daerah yang bersangkutan antara lain Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil.

Kabupaten Tapin merupakan salah satu kabupaten di Kalimantan Selatan yang memiliki potensi sumber daya alam yang mempuni untuk meningkatkan pembangunan, yaitu pertambangan, penggalian, pariwisata dan pertanian. Pengalokasian anggaran yang tepat pada potensi sumber daya alam tentu dapat menjadi rangsangan untuk meningkatkan pembangunan daerah di Kabupaten Tapin. Maka dari itu, pemerintah secara tidak langsung dituntut untuk meningkatkan potensi-potensi yang ada di daerahnya dengan pengalokasian dana belanja daerah secara tepat.

Suatu daerah dapat dikatakan pengelolaan sumber daya pekonomiannya baik jika daerah tersebut sudah mandiri. Yang dimaksud mandiri ini adalah daerah yang mampu memanfaatkan pendapatan asli daerahnya sebagai belanja daerah dan tidak lagi bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Yang dimaksud dana transfer ini yaitu dana perimbangan

Dari data pendapatan daerah dan belanja daerah kabupaten Tapin tahun 2007-2019 yang didapat dari BPKAD Kabupaten Tapin dapat dilihat bahwa pendapatan daerah kabupaten Tapin (tanpa lain-lain pendapatan daerah yang sah) yang meliputi PAD, DAU, DAK, dan DBH cenderung mengalami defisit dimana lebih sedikit dibanding anggaran belanja daerahnya, kecuali pada tahun 2019 dimana total pendapatan daerah (PAD, DAU, DAK, DBH) mengalami surplus. Dengan demikian, perlu diketahui bagaimana pengaruh antara PAD terhadap belanja daerah serta bagaimana pengaruh dana perimbangan (DAU, DAK, dan DBH) secara bersama-sama dan masing-masing terhadap belanja daerah di kabupaten Tapin, serta sumber pendapatan daerah yang manakah yang paling dominan dalam membiayai anggaran belanja daerah kabupaten Tapin dari keempat sumber pendapatan daerah tersebut.

KAJIAN PUSTAKA

Definisi Pengaruh

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Jadi jika dikaitkan dan dijelaskan dengan penelitian ini, pengaruh merupakan kemampuan pendapatan daerah dalam menentukan anggaran belanja daerah sesuai dengan

rancangan APBD yang disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah (Kemenkeu, 2017). Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, APBD merupakan rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Semua penerimaan Daerah dipungut dengan tujuan agar target yang ditetapkan oleh APBD terpenuhi. Selain itu, semua pengeluaran daerah serta segala urusan yang membebani daerah dalam pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai dengan penetapan APBD dengan memperhatikan jumlah dan sarannya. Hal tersebut karena peranan APBD yaitu sebagai dasar dari pengelolaan keuangan daerah, maka dengan peran tersebut menjadikan APBD sebagai dasar untuk kegiatan dalam mengendalikan, memeriksa, dan mengawasi keuangan daerah.

Belanja Daerah

Belanja daerah menurut (Nordawan, 2012) merupakan semua atas pengeluaran daerah dimana akan mengurangi keuangan (dana lancar) dalam periode tahun anggaran. Dalam pengeluaran tersebut, pembayarannya oleh pemerintah tidak akan diperoleh kembali. Belanja daerah bersifat wajib dalam pendanaan seluruh pelaksanaan urusan pemerintah daerah. Agar anggaran belanja daerah digunakan secara efektif dan efisien, setiap daerah diharapkan untuk mengalokasikan anggaran belanja daerah sesuai porsi yang tepat dengan mempertimbangkan kebutuhan serta potensi akan daerahnya masing-masing.

Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang dinyatakan sebagai sesuatu yang menambah nilai kekayaan bersih suatu daerah. Sesuai dengan Pengelolaan APBD, pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah lainnya yang dipisahkan, Lain-lain hasil pendapatan asli daerah yang sah), Dana Perimbangan (DBH pajak/bukan pajak, DAU, DAK), serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah

PAD adalah pendapatan yang diperoleh suatu daerah dari sumber daya daerahnya sendiri. Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung dalam membiayai daerahnya sendiri sebab pendapatan asli daerah ini menggambarkan pendapatan yang sesuai dengan kemampuan daerah itu sendiri, oleh karenanya besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD perlu diukur untuk mengetahui bagaimana kemampuan suatu daerah dalam melaksanakan ekonomi secara mandiri, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap anggaran belanja daerah maka semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan dana transfer dari pemerintah pusat.

Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan dana transfer yang berasal dari APBN dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal daerah dengan daerah yang lain, serta membantu daerah untuk meningkatkan kapasitas dalam menggali potensi ekonomi daerahnya, dengan demikian harapannya akan terjadi pembagian keuangan yang adil dan rasional serta pembangunan daerah yang merata. Sumber-sumber dana perimbangan antara lain DAU, DAK, dan DBH yang mana fungsinya berbeda-beda.

DAU merupakan dana transfer yang memiliki peran pengalokasian dananya sebagai penyedia layanan dasar kepada masyarakat. Dana Alokasi Umum menurut (Syarifin & Jubaedah, 2005) yaitu dana yang pengalokasiannya ditujukan untuk/kepada daerah agar kemampuan keuangan antara daerah dengan daerah yang lainnya merata dalam pembiayaan kemampuan pengeluarannya.

DAK menurut (Syarifin & Jubaedah, 2005) yaitu dana APBN dimana pengalokasiannya ditujukan hanya kepada daerah tertentu saja dimana dana ini dikeluarkan untuk kegiatan khusus dalam urusan Pemerintah Daerah dimana kegiatan tersebut merupakan prioritas nasional.

DBH yaitu sumber pendapatan daerah yang berasal dari pajak dan kekayaan daerah yang bertujuan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi hasil sumber daya daerah tersebut.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tapin yaitu tentang Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil) dan Belanja Daerah di Kabupaten Tapin. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder *time series* tahun 2007-2019. Data tersebut didapatkan dari instansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tapin.

Definisi Operasional

Belanja Daerah (Y) sesuai dengan isi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah menyebutkan bahwa belanja daerah adalah kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah dinyatakan dalam satuan rupiah.

PAD (X1) adalah salah satu sumber penerimaan daerah yang hasilnya dari potensi daerahnya sendiri dimana dapat menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam memenuhi pembiayaan kegiatan daerahnya sendiri. Pendapatan Asli Daerah dinyatakan dalam satuan rupiah.

DAU (X2) adalah salah satu dana transfer dari APBN yang alokasinya bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antara daerah dengan daerah yang lainnya untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum dinyatakan dalam satuan rupiah.

DAK (X3) adalah salah satu dana transfer dari APBN yang mana pengalokasiannya kepada daerah yang berkebutuhan khusus dalam melaksanakan urusan daerah dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus dinyatakan dalam satuan rupiah.

DBH (X4) adalah salah satu dana transfer dari APBN dengan pengalokasian dananya kepada daerah-daerah yang berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil dinyatakan dalam satuan rupiah.

Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda yang dibantu oleh program aplikasi komputer SPSS versi 25 dan Microsoft Excel 2016. Dalam penelitian ini menggunakan enam dugaan dalam menguji hipotesa sekaligus untuk membantu menjawab rumusan masalah yang ada.

1. PAD, DAU, DAK, dan DBH secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Tapin.
2. a. PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Tapin.
b. DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Tapin.
c. DAK berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Tapin.
d. DBH berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Tapin.
3. Variabel Dana Bagi Hasil merupakan variabel yang paling dominan

Untuk membuktikan hipotesis di atas, maka dilakukan uji hipotesis antara lain Uji koefisien determinasi (R^2) yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel bebas, uji F-statistik digunakan untuk menguji bagaimana keempat variabel secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat, dan uji t-statistik

digunakan untuk menguji bagaimana masing-masing variabel bebas mempengaruhi variabel terikat secara sendiri-sendiri. Berikut merupakan persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini:

Rumus 1. Model Penelitian

$$\text{Belanja Daerah} = \alpha + \beta_1\text{PAD} + \beta_2\text{DAU} + \beta_3\text{DAK} + \beta_4\text{DBH} + \varepsilon$$

Keterangan :

α = Konstanta

β_1 - β_4 = Koefisien Variabel PAD, DAU, DAK, DBH

ε = Error

Penelitian ini menggunakan transformasi data logaritma natural karena terdapat masalah pada persamaan regresi linier berganda dimana nilai konstanta serta sebagian koefisien pada variabel bebas mengeluarkan nilai negatif. Maka dengan transformasi data logaritma natural ini, masalah tersebut dapat teratasi. Dengan demikian, persamaan regresi linier berganda dengan transformasi data logaritma natural (Ln) dinyatakan dalam bentuk formula sebagai berikut:

Rumus 2. Model Penelitian (Ln)

$$\text{LnBelanja Daerah} = \alpha + \beta_1\text{LnPAD} + \beta_2\text{LnDAU} + \beta_3\text{LnDAK} + \beta_4\text{LnDBH} + \varepsilon$$

Keterangan :

Ln = Log Natural variabel

α = Konstanta

β_1 - β_4 = Koefisien Variabel LnX1 - LnX4

ε = Error

HASIL DAN ANALISIS

Statistik Deskriptif

Analisis deskripsi statistik pada variabel bertujuan untuk menilai karakteristik sebuah data yang diteliti. Namun dalam penelitian ini hanya menguraikan beberapa karakteristik yaitu nilai Standar Deviasi, nilai Mean (rata-rata), nilai Minimum dan Maksimum.

Tabel 1.

Deskriptif Statistik

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Std. Deviasi
PAD	13	13.626.875.047	102.654.659.947	47.006.591.575	30684078290,653
DAU	13	234.940.418.200	477.467.034.000	358.453.314.277	91294812644,513
DAK	13	29.263.390.000	211.093.000.000	81.227.555.848	61520162117,940
DBH	13	54.753.286.608	445.534.943.679	216.389.076.540	115925803588,083
Belanja Daerah	13	369.678.334.674	1.244.530.368.789	814.361.725.568	309831553094,449

Sumber : Hasil Pengolahan Data Sekunder 2021 SPSS

Belanja Daerah kabupaten Tapin dengan nilai terendah sebesar Rp369.678.334.674 pada tahun 2007 dan dengan nilai tertinggi sebesar Rp1.244.530.368.789 pada tahun 2015. Rata-rata Belanja Daerah kabupaten Tapin pada tahun 2007-2019 yaitu sebesar Rp814.361.725.568.

Pendapatan Asli Daerah kabupaten Tapin dengan nilai terendah sebesar Rp13.626.875.047 pada tahun 2007, dan dengan nilai tertinggi sebesar Rp102.654.659.947

pada tahun 2019. Nilai rata-rata Pendapatan Asli Daerah kabupaten Tapin pada tahun 2007-2019 yaitu sebesar Rp47.006.591.575

Dana Alokasi Umum kabupaten Tapin dengan nilai terendah sebesar Rp234.940.418.200 pada tahun 2007, dan dengan nilai tertinggi sebesar Rp477.467.034.000 pada tahun 2019. Nilai rata-rata Dana Alokasi Umum kabupaten Tapin pada tahun 2007-2019 yaitu sebesar Rp358.453.314.277.

Dana Alokasi Khusus kabupaten Tapin dengan nilai terendah sebesar Rp29.263.390.000 pada tahun 2012 dan dengan nilai tertinggi sebesar Rp211.093.000.000 pada tahun 2016. Nilai rata-rata Dana Alokasi Khusus kabupaten Tapin pada tahun 2007-2019 yaitu 81.227.555.848.

Dana Bagi Hasil kabupaten Tapin dengan nilai terendah sebesar Rp54.753.286.608 pada tahun 2007, dan dengan nilai tertinggi sebesar Rp445.534.943.679 pada tahun 2019. Nilai rata-rata Dana Bagi Hasil kabupaten Tapin pada tahun 2007-2019 yaitu sebesar Rp216.389.076.540.

Model Regresi Linier Berganda

Tabel 2.

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	Unstd. Coefficients		Std. Coefficient	t-hitung	Sig.
	b	Std. Error	Beta		
Konstanta	0,877	7,983		0,11	0,915
PAD	0,054	0,186	0,09	0,288	0,781
DAU	0,569	0,464	0,366	1,227	0,255
DAK	0,13	0,073	0,226	1,784	0,112
DBH	0,262	0,107	0,394	2,443	0,04

a. Variable bebas: BELANJA DAERAH

Sumber : Hasil Pengolahan Data Sekunder, 2021 SPSS

Berdasarkan tabel 2. di atas, berikut persamaan model regresi linier berganda pada penelitian ini :

$$\text{Ln}\hat{Y} = 0,877 + 0,054\text{LnPAD} + 0,569\text{LnDAU} + 0,130\text{LnDAK} + 0,262\text{LnDBH}$$

Dengan hasil persamaan model regresi di atas, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (α) 0,887 serta memiliki nilai positif, dalam hal ini dapat diartikan bahwa jika variabel bebas Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2), Dana Alokasi Khusus (X3), dan Dana Bagi Hasil (X4) dianggap sama dengan nol, maka variabel terikat yaitu Belanja Daerah (Y) sebesar 0,877 persen.
2. Nilai koefisien PAD sebesar 0,054, artinya dalam hal ini dapat diartikan bahwa jika variabel bebas PAD mengalami kenaikan sebesar 1 persen, sementara DAU, DAK, dan DBH dianggap tetap maka dalam hal ini akan mengakibatkan kenaikan Belanja Daerah sebesar 0,054 persen.
3. Nilai koefisien DAU sebesar 0,569, artinya dalam hal ini dapat diartikan bahwa jika variabel bebas DAU mengalami kenaikan sebesar 1 persen, sementara PAD, DAK, dan DBH dianggap tetap maka dalam hal ini akan mengakibatkan kenaikan Belanja Daerah sebesar 0,569 persen.
4. Nilai koefisien DAK sebesar 0,130, artinya dalam hal ini dapat diartikan bahwa jika variabel bebas DAK mengalami kenaikan sebesar 1 persen, sementara PAD, DAU, dan DBH dianggap tetap maka dalam hal ini akan mengakibatkan kenaikan Belanja Daerah sebesar 0,13 persen.
5. Nilai koefisien DBH sebesar 0,262, artinya dalam hal ini dapat diartikan bahwa jika variabel bebas DBH mengalami kenaikan sebesar 1 persen, sementara PAD, DAU, dan DAK dianggap tetap maka dalam hal ini akan mengakibatkan kenaikan Belanja Daerah sebesar 0,262 persen.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 3.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,979	0,959	0,938	0,1045873

a. Predictors: (Constant), DBH, DAK, DAU, PAD

Sumber : Hasil Pengolahan Data Sekunder, 2021 SPSS

Berdasarkan hasil uji determinasi R^2 dengan menggunakan program SPSS versi 25 pada tabel 3. di atas, dapat dilihat bahwa variabel terikat Belanja Daerah (Y) dapat dijelaskan oleh variabel bebas Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2), Dana Alokasi Khusus (X3), dan Dana Bagi Hasil (X4) dengan nilai R^2 sebesar 0,959. Artinya 95,9% perubahan Belanja Daerah dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil, sedangkan sisanya sebesar 4,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dan tidak dimasukkan kedalam model seperti Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Uji Simultan F-Statistik

Tabel 4.

Hasil Uji F-statistik

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F-hitung	Sig.
	Regression	2,025	4	0,506	46,282	0,000
1	Residual	0,088	8	0,011		
	Total	2,113	12			

a. Dependent Variable: BELANJA DAERAH

b. Predictors: (Constant), DBH, DAK, DAU, PAD

Sumber : Hasil Pengolahan Data Sekunder, 2021 SPSS

Hasil dari uji f-statistik oleh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Tapin. Berdasarkan rumus yang ada maka diperoleh nilai f-tabel sebesar 3,84 ($\alpha= 5\%$ dan $df_1= 4$, $df_2 = 8$) sedangkan f-hitung sebesar 46,282, maka dalam hal ini nilai f-hitung $46,282 > f\text{-tabel } 3,84$. Nilai probabilitas berdasarkan uji f-statistik di atas adalah sebesar $0,000 < \text{taraf signifikansi } 0,05$.

Uji Parsial t-Statistik

Tabel 5.

Hasil Uji t-statistika

Model		t-hitung	Sig.
	Konstanta	0,110	0,915
	PAD	0,288	0,781
1	DAU	1,227	0,255
	DAK	1,784	0,112
	DBH	2,443	0,040

a. Dependent Variable: BELANJA DAERAH

Sumber : Hasil Pengolahan Data Sekunder, 2021 SPSS

Hasil perhitungan uji t–statistik berdasarkan pada tabel 5.. dapat dilihat variabel PAD memiliki nilai t–hitung sebesar 0,288, dengan menggunakan taraf signifikansi (α) sebesar 0,05 serta nilai df nya adalah sebesar 8, maka nilai t tabel = 2,3060, sedangkan nilai probabilitas Pendapatan Asli Daerah berdasarkan hasil uji t–statistik sebesar 0,781. Dapat disimpulkan bahwa dugaan 2a ditolak, artinya variabel Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Tapin, dikarenakan nilai t hitung yang diperoleh sebesar $0,288 < \text{nilai t tabel } 2,3060$ serta nilai probabilitas Pendapatan Asli Daerah sebesar $0,781 >$ dari taraf signifikansi (α) 5 persen (0,05). Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah. Penelitian ini sehasil dengan penelitian yang sebelumnya diteliti oleh (Sorongan, 2013), hasilnya yaitu PAD kurang memberi kontribusi terhadap Belanja Daerah. Namun hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang sebelumnya diteliti oleh (Fatimah, Nopiyanti, & Mintoyuwono, 2019) dan (Liando & Hermanto, 2017) dengan hasil yaitu PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

Variabel Dana Alokasi Umum memiliki nilai t–hitung sebesar 1,227 dengan menggunakan taraf signifikansi (α) sebesar 0,05 serta nilai df nya adalah sebesar 8, maka nilai t tabel = 2,3060, sedangkan nilai probabilitas Dana Alokasi Umum berdasarkan hasil uji t–statistik sebesar 0,255. Dapat disimpulkan bahwa dugaan 2b ditolak, artinya variabel DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Tapin dikarenakan nilai t hitung yang diperoleh sebesar $1,227 < \text{nilai t tabel } 2,3060$, serta nilai probabilitas Dana Alokasi Umum sebesar $0,255 >$ taraf signifikansi (α) 5 persen (0,05). Pada penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja daerah di kabupaten Tapin. Penelitian ini sehasil dengan penelitian sebelumnya yang diteliti oleh (Sorongan, 2013), hasilnya menunjukkan bahwa DAU kurang berkontribusi terhadap Belanja Daerah, dan juga sehasil dengan penelitian yang diteliti oleh (Nur, 2015) dengan hasil yaitu DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Namun hasil enelitian ini bertolak belakang dengan penelitian sebelumnya yang diteliti oleh (Fatimah, Nopiyanti, & Mintoyuwono, 2019) dan (Liando & Hermanto, 2017) yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

Variabel Dana Alokasi Khusus memiliki nilai t–hitung sebesar 1,784 dengan menggunakan taraf signifikansi sebesar (α) sebesar 0,05 serta nilai df nya adalah sebesar 8, maka nilai t tabel = 2,3060 sedangkan nilai probabilitas DAK berdasarkan hasil uji t– statistik sebesar 0,112. Dapat disimpulkan bahwa dugaan 2c ditolak, artinya DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Tapin dikarenakan nilai t hitung yang diperoleh sebesar $1,784 < \text{nilai t tabel } 2,3060$, serta nilai probabilitas DAK sebesar $0,112 >$ dari taraf signifikansi (α) 5 persen (0,05). Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa DAK tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Tapin. Penelitian ini sehasil dengan penelitian sebelumnya yang diteliti oleh (Fatimah, Nopiyanti, & Mintoyuwono, 2019) dan (Handayani & Nuraina, 2012) dengan hasil yaitu DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Namun hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian sebelumnya yang diteliti oleh (Nur, 2015) dan (Liando & Hermanto, 2017) dimana hasilnya menyatakan bahwa DAK berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

Variabel Dana Bagi Hasil memiliki nilai t–hitung sebesar 2,443 dengan menggunakan taraf signifikansi sebesar (α) sebesar 0,05 serta nilai df nya adalah sebesar 8, maka nilai t tabel = 2,3060 sedangkan nilai probabilitas DBH berdasarkan hasil uji t– statistik sebesar 0,040. Dapat disimpulkan bahwa dugaan 2d diterima, artinya variabel DBH berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Tapin dikarenakan nilai t hitung yang diperoleh sebesar $2,443 > \text{nilai t tabel } 2,3060$, serta nilai probabilitas DBH sebesar $0,040 <$ dari taraf signifikansi (α) 5 persen (0,05). Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa DBH berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Tapin. Penelitian ini

sehasil dengan penelitian sebelumnya yang diteliti oleh (Liando & Hermanto, 2017) dengan hasil bahwa DBH berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Namun hasil dari penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian sebelumnya yang diteliti oleh (Fatimah, Nopiyanti, & Mintoyuwono, 2019) yang menyatakan bahwa DBH tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

Berdasarkan implementasi hasil uji t -statistik di atas dapat disimpulkan bahwa Dana Bagi Hasil (X4) merupakan satu-satunya variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Tapin sekaligus menjadi variabel yang paling dominan, dikarenakan hanya variabel Dana Bagi Hasil saja t hitung $>$ t tabel serta nilai probabilitas $<$ dari taraf signifikansi (α) 5 persen (0,05) apabila dibandingkan dengan variabel-variabel lain.

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil dari pembahasan yang telah diuraikan dalam penelitian ini sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, dapat diolah hasil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama atau secara simultan diperoleh hasil bahwa dugaan 1 diterima, artinya PAD (X1), DAU (X2), DAK (X3), dan DBH (X4) secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Tapin.
2. Hasil uji t -statistik variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Tapin, sedangkan variabel Dana Bagi Hasil berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Tapin. Sehingga diantara keempat variabel bebas yaitu PAD (X1), DAU (X2), DAK (X3), dan DBH (X4), hanya variabel DBH (X4) saja yang berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Tapin. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa variabel DBH (X4) merupakan variabel yang paling dominan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian skripsi mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2007-2019”, peneliti memberikan saran pada pihak-pihak yang terkait berdasarkan permasalahan yang terjadi, antara lain:

1. Pemerintahan kabupaten Tapin cenderung bergantung pada dana bagi hasil karena merupakan satu-satunya variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah, peran pemerintah sangat penting dalam mengupayakan pengalokasian dana tersebut.
2. Dari hasil penelitian ini dimana PAD, DAU, dan DAK berpengaruh tidak secara signifikan, untuk itu pemerintah daerah kabupaten Tapin disarankan agar dapat berupaya untuk meningkatkan PAD melalui pengelolaan dana transfer agar dapat dialokasikan secara tepat dan berpotensi dalam peningkatan pembangunan keuangan masyarakat daerah melalui realisasi Belanja Daerah yang berbentuk pengadaan pelayanan yang dibutuhkan bagi masyarakat. Dengan demikian masyarakat dapat meningkatkan kemampuan keuangannya yang diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber utama bagi PAD, maka dari itu peneliti menyarankan agar pemerintah daerah mengambil kebijakan untuk mempergiat lagi dalam penagihan Pajak daerah serta lebih meningkatkan Retribusi Daerah. Untuk peningkatan DAK, pemerintahan daerah kabupaten Tapin diharapkan dapat melakukan optimalisasi pengelolaan DAK dengan cara memaksimalkan ketiga kriteria DAK yaitu umum, khusus, dan teknis. Dengan

demikian harapannya semoga Pemerintah Pusat dapat meningkatkan mentransferan DAK agar dapat mendorong percepatan pembangunan daerah.

3. Penelitian ini masih belum memenuhi jumlah sampel data minimal untuk melakukan proses regresi karena ketersediaan data yang terbatas, untuk itu disarankan bagi peneliti selanjutnya agar dapat memenuhi jumlah sampel data minimal agar hasil penelitian mendapatkan hasil yang lebih akurat.

BIBLIOGRAPHY

- Fatimah, N. N., Nopiyanti, A., & Mintoyuwono, D. (2019). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA . *Equity*, 197-214.
- Handayani, D., & Nuraina, E. (2012). Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Madiun. *ASSETS: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 1-12.
- Indonesia, R (2004). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*
- Indonesia, R (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Kemenkeu. (2017). *Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. Diambil kembali dari Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>. Diakses pada tanggal 20 Juni 2021.
- Liando, I. I., & Hermanto, S. B. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* , 1-22.
- Nur, M. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana . *Assets*, 78-88.
- Sorongan, J. F. (2013). ANALISIS HUBUNGAN DAU, PAD DAN BELANJA DAERAH. *Jurnal EMBA*, 171-180.
- Syarifin, P., & Jubaedah, D. (2005). *Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia.